

Demokrasi Elektoral dalam Kendali Kuasa Oligarki

Mohammad Ali Andrias¹, Teguh Anggoro², Riska Sarofah³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Bina Putera Banjar

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi

¹mohammadali@unsil.ac.id, ²goeh_an77@yahoo.co.id, ³riskasarofah@unsil.ac.id

***Email Korespondensi:** mohammadali@unsil.ac.id

Abstrak

Pergelaran pemilu dan pilkada secara serentak tahun 2024 masih meninggalkan jejak politik yang pelik, sehingga sulit menghasilkan proses pemilu yang demokratis dan substantial bagi aspirasi politik rakyat. Hal ini dikarenakan hasil refleksi pilkada tahun 2017 dan pemilu tahun 2019 di Kota Tasikmalaya. Meskipun *rule of law* politik elektoral sudah diamanatkan, dan pengawasan cukup ketat dari KPU dan Bawaslu dalam menghasilkan proses pemilu demokratis. Sepertinya pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah “Kota Santri” masih mengalami hal yang sama, politik lokal sebagai arena pertarungan para oligark yang memperebutkan kekuasaan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi lapangan yang intensif, *focus group discussion* (FGD), dan menelusuri dokumentasi dan kajian literatur lainnya. Berdasarkan temuan yang dipublikasikan pada artikel ilmiah ini menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, sejumlah pengusaha di Kota Tasikmalaya merupakan bekas jaringan patronase Soeharto, yang melanjutkan pola kuasa yang pernah dilakukan para elit Orde Baru di Indonesia. Pengusaha tersebut berhasil menempatkan sejumlah kolega dan keluarganya menjadi pejabat pemerintahan dan elit partai politik berbasis Islam ataupun nasionalis. *Kedua*, kaum oligark merupakan pengusaha yang tidak lagi melakukan pengaturan politik di belakang layar, mereka semakin terlibat langsung menjadi elit politik, sekaligus membiayai kerabat dan koleganya agar menjadi legislatif maupun eksekutif. *Ketiga*, kaum oligark tidak lagi didominasi pengusaha pribumi, namun pengusaha keturunan Tionghoa turut melakukan perebutan kekuasaan melalui para pejabat yang dibiayainya.

Kata Kunci : Demokrasi, Oligarki, Pemilihan Umum, Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Rencana perhelatan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada 14 Februari 2024. Kesepakatan ini diambil bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, merupakan proses refleksi politik elektoral hasil pemilu tahun 1999 di era reformasi, dan sebagai babak baru agar masyarakat Indonesia memiliki kebebasan berpolitik dan lebih demokratis. Rakyat Indonesia tidak hanya merdeka dalam berpolitik, tapi diberikan keleluasaan memilih dan menentukan secara langsung pejabat - pejabat politik yang akan menjalankan roda pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah¹. Kebebasan berpolitik ini akan menghasilkan kualitas proses dan hasil politik elektoral, yang tujuannya menentukan kualitas para elit yang benar – benar mampu menjalankan lembaga eksekutif maupun legislatif yang berujung kualitas produk politik kebijakan publik. (Widanarto, 2011)

Bahkan dalam perspektif demokrasi mempercayai jika pemilu merupakan alat politik yang tepat dan sangat vital untuk menentukan masa depan bangsa, asalkan dijalankan sesuai *rule of law*. Karena pemilu memiliki tujuan politik sebagai mekanisme menyeleksi pemimpin yang memiliki moralitas, akuntabilitas, dan integritas yang memadai. Kemudian sebagai mekanisme pemindahan konflik politik dari masyarakat ke lembaga pemerintahan. Pemilu juga sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan, atau menggalang dukungan dan partisipasi politik rakyat terhadap negara. Proses pemilu yang baik seharusnya tidak akan ada lagi jarak antara elit pemerintahan sebagai pengambilan kebijakan dengan masyarakatnya. Sehingga akan mendorong kepercayaan terhadap partai politik (parpol) dan pemerintahan yang terpilih secara demokratis. (Prihatmoko, 2003)

Namun demikian proses dan hasil pemilu di era reformasi yang hampir 25 tahun ini. Sejumlah peneliti antara lain Prihatmoko (2003) Widanarto dan Agustinus (2011), serta Nazsir

¹Pemilu 1999 rakyat hanya memilih anggota legislatif, sementara presiden, bupati, atau walikota dipilih oleh para legislatif di dalam parlemen. Tradisi politik ini masih belum berubah meski era pemerintahan Orde Baru telah lengser. Pada pemilu 2004 sebagai babak baru paling penting pelaksanaan demokratisasi di Indonesia, karena presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi pada saat itu kepala daerah tidak secara otomatis dipilih secara langsung. Karena tuntutan politik semakin kencang untuk memilih kepala daerah secara langsung. Maka pemerintah pada tahun 2005 mengesahkan pelaksanaan pilkada (gubernur, bupati, dan walikota) dipilih secara langsung oleh rakyat, hingga nanti pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

dan Amril (2004). Proses dan hasil pemilu di era reformasi dianggap menghasilkan konsolidasi demokrasi, pendidikan politik bagi rakyat, dan partisipasi politik bagi rakyat di “akar rumput”.

Akan tetapi dari kajian - kajian tersebut tidak menjelaskan implikasi lain dari proses elektoral dari periode ke periode pemilu. Apakah hasil pemilu menghasilkan demokrasi yang substansial atau prosedural, tidak adanya oligarki, politik kekerabatan, dinasti politik, intimidasi, premanisme, kekuatan uang, memobilisasi rakyat dengan sentimen politik SARA, politik identitas, serta menciptakan patronase dengan para pemilih ?.

Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Tasikmalaya, faktanya proses pemilu ataupun pilkada secara langsung sejak dimulai tahun 2007, telah menguatkan eksistensi para oligark yang makin bebas menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya, agar mampu melakukan perebutan kekuasaan melalui politik elektoral. Hasil penelitian ini hampir mirip apa yang disampaikan Winters (2014), Hadiz dan Robinson (2014), serta Agustino (2010 dan 2011). Struktur formal demokrasi elektoral ternyata dapat hidup berdampingan dengan oligarki. Demokratisasi memang telah mengubah bentuk politik Indonesia, tetapi tanpa menyingkirkan kekuasaan oligarki (Ford dan Pepinsky, 2014). Pemilu yang demokratis dan kompetitif sekalipun, memang memiliki efek nyata meminimalisir perilaku oligark. Tetapi tidak akan sanggup untuk menghilangkan pengaruh oligarki dalam proses politik elektoral. Bahkan para oligark mampu beradaptasi dengan sistem pemilu yang sudah diamandemen agar demokratis sekalipun.

Beberapa riset yang dirangkum Nordholt dan Klinken (2007) dan Bayo, dkk (2018) ada pandangan yang pesimistik terhadap dinamika politik elektoral era reformasi. Dalam beberapa tahun setelah pemilu ataupun pilkadata diselenggarakan di daerah, belum membuahkan hasil politik yang memuaskan membangun demokratisasi. Distribusi kekuasaan semakin tidak merata, pemilik kekuasaan di tingkat lokal hanya dihuni segelintir elit yang berproses membentuk dinasti politik. Mereka memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan politik kekerabatan yang kuat. Para oligark ini memiliki kesempatan lebih besar, bahkan makin menguat memanfaatkan politik elektoral sebagai ajang perebutan kekuasaan demi mengakumulasi dan mempertahankan kekayaannya di daerah.

Sehingga fenomena politik elektoral di era reformasi telah memunculkan problematika tersendiri, yang awalnya ingin melepaskan sistem politik otoriter yang tidak demokratis. Justru reformasi politik ini telah memunculkan kekuasaan oligarki lokal yang ingin menata kekuatan ekonomi – politik demi kepentingannya di daerah. Ekspektasi terwujudnya demokrasi, *good governance*, dan *good goverment* hanya sebatas jargon saja. Sehingga makin memunculkan

pandangan pesimistik terhadap pemilu ataupun pilkada yang dianggap proses politik demokratis. (Hadiz, 2005; Agustino, 2011; Rahmawati, 2015; Zuhro, 2009)

Penelitian di Kota Tasikmalaya ini, peneliti berupaya mengungkap siapa yang disebut para oligark lokal tersebut. Ternyata para oligark ini tidak hanya satu aktor melainkan beberapa aktor dari pengusaha pribumi dan pengusaha Tionghoa. Para oligark ini ada yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Adapula para oligark saling bekerjasama untuk menguatkan simpul – simpul jejaring kekuasaan mereka dalam perebutan kekuasaan menghadapi para pesaing politik yang dianggap berseberangan dengan kepentingan ekonomi - politiknya.

Figur oligark dari pengusaha pribumi yaitu keluarga pengusaha AAH (Aa Hernawan / Pemilik PT Tri Mukti), dan pengusaha EJ (Endang Juta). Para pengusaha merupakan para oligark yang selalu terlibat aktif melakukan pembiayaan politik kepada sejumlah calon legislatif, calon bupati, dan walikota agar “jagoan” politiknya mampu merebut kursi kekuasaan. Selain itu, pembiayaan politik tidak hanya dari para pengusaha pribumi tersebut, namun ada sejumlah pengusaha keturunan Tionghoa yang berani meng – *endorse* para calon pejabat publik, elit parpol, birokrasi, hingga ormas di Tasikmalaya. Alasan politik para pengusaha Tionghoa ini ingin menguatkan sekaligus mengamankan kerajaan bisnisnya di Tasikmalaya. Bahkan ada salah satu pengusaha Tionghoa mampu merebut kursi di DPRD Kota Tasikmalaya selama dua periode berturut - turut².

Dari artikel ilmiah yang disampaikan Robinson (2014), Hadiz (2004, 2013), Aspinall (2013), Suyatna, (2013), serta Djani dan Saputro (2013). Kelas kapitalis Tionghoa memang menjadi analisis penting dalam memahami dinamika perpolitikan Indonesia kontemporer. Kapitalisme Tionghoa sudah terbentuk di era pemerintahan Soeharto. Hanya saja modal finansial mereka di era reformasi jauh lebih kuat ketimbang 30 tahun silam. Kendati demikian, kaum borjuasi Tionghoa saat ini unggul sebagai komponen kapitalis yang mendominasi bisnis, bahkan berusaha melakukan kontrol kuasa melalui politik elektoral di era reformasi³.

² Padahal pada tahun 1996 warga Tionghoa di Tasikmalaya pernah menjadi sasaran amuk massa. Mereka dijadikan sasaran politik karena terlalu menguasai sektor-sektor ekonomi dan perdagangan, yang seharusnya menjadi milik pribumi Tasikmalaya. Kini di era reformasi para pengusaha Tionghoa sudah bangkit kembali di berbagai bidang bisnis seperti propertis, transportasi, pusat perbelanjaan, perhotelan, serta konstruksi. (Mudzakir, 2017; Putra, 2012)

³ Meski konglomerat Tionghoa cukup mendominasi sektor swasta, ada pengecualian mengenai persinggungannya terhadap politik. Etnis Tionghoa lemah melakukan kontrol langsung atas tuas kekuasaan, karena masih sedikit yang menduduki jabatan di pemerintahan. Namun mereka terbukti lihai menjalin relasi dengan para elit politik. Transformasi politik memberi implikasi kuat terhadap modal swasta ketimbang era Orba sebelumnya. Borjuis Tionghoa tumbuh pesat dalam bisnisnya. Era reformasi tidak hanya menuntut liberalisasi politik, namun secara ekonomi ada keinginan dari pelaku swasta tersebut mendapat ruang yang teraktualisasi secara bersamaan dengan kemudahan dari pemerintah, agar relasi bisnis-politiknya memberi efek positif bagi perekonomian di daerah.

Berdasarkan refleksi pemilu 2019 dan pilkada 2020 di Tasikmalaya tersebut. Pertanyaannya, bagaimana para oligark memiliki kepentingan politik dengan sejumlah elit parpol, calon kepala daerah, dan calon legislatif ?. Bagaimana pula partai yang mendukung para oligark yang bukan kader partai dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang?. Penjelasan dalam artikel ilmiah hasil penelitian ini menarik untuk dipaparkan. Karena ada relasi antar aktor yang dibangun, jejaring finansial yang dimainkan hingga perebutan kekuasaan terjadi antar oligark. Dalam artikel ini, Penulis berasumsi dinamika politik elektoral tahun 2024 mendatang di Tasikmalaya sangat ditentukan kuatnya *vote-buying* dari para oligark tersebut. Sebagaimana pola yang dilakukan pada pemilu 2019 dan pilkada 2017, sehingga memungkinkan oligark akan tetap menjadi penguasa politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang oligarki sangat beririsan dengan penguasa kapital yang menjadi penguasa politik. Oligarki menjabarkan tatanan politik individu kaya yang berkuasa karena sumber daya material⁴. Individu ini memiliki kekuasaan dan kekayaan yang berlebihan di dalam maupun di luar pemerintahan. Menjelaskan kekuasaan sekelompok kecil tidaklah cukup sebagaimana dijelaskan Aristoteles (Winters, 2011; Nurcholis, 2016).

Motif oligarki kental dengan keinginan segelintir minoritas elit kaya raya, yang berupaya memiliki kekuasaan dan mempertahankan kekayaan. Realitas kekayaan di tangan minoritas menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik termasuk demokrasi⁵. Jika menyangkalnya berarti mengabaikan analisis politik yang telah berabad-abad tentang akrabnya relasi kekayaan dan kekuasaan⁶.

Diskusi akademik dalam pola kuasa oligarki ada “pertukaran” material dengan suara, menunjukkan kekuatan uang dilakukan para oligark menjadi alat penting dalam merebut

⁴ Oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya. Sumber daya itu harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi, jika kekayaan pribadi tidak dimiliki atau tidak ada, maka oligark juga tidak ada. Oligark selalu individu bukan kepada lembaga, perusahaan, atau kelompok.

⁵Tafsir ini mengandung konsekuensi tentang penilaian demokrasi Indonesia pasca Orba. Perilaku dan strategi kaum oligark mungkin bisa diubah oleh proses pemilu demokratis dan desentralisasi politik. Tetapi tidak ada “obat mujarab” bersifat institusional, elektoral, atau gerakan massa menghancurkan relasi kekayaan dan kekuasaan. Menghancurkan praktek-praktek oligarki yang bisa dilakukan hanya melalui revolusi politik.

⁶Klaim sederhananya, distribusi sumber daya material di antara anggota-anggota komunitas politik punya pengaruh besar pada kekuasaan. Makin tidak berimbang distribusinya makin besar kekuasaan dan pengaruh orang-orang kaya, dan makin kuat pula pengaruh kesenjangan material pada motif dan tujuan politik mereka. Oligarki memusatkan perhatian pada kuasa kekayaan dan politik, karena hubungan uang dan kekuasaan nyaris niscaya di dalam studi politik. Maka akan mengagetkan apabila ada penolakan terhadap usul bahwa ketidaksetaraan dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan pengaruh politik.

kekuasaan, khususnya dalam sistem pemilihan pejabat. Uang yang digelontorkan oligark membantu kandidat memobilisasi dukungan pemilih. Atau, uang dapat membantu meyakinkan pemilih membeli suara layak didukung, serta uang dapat “menukar” keputusan pemilih sebelum memberikan suara di bilik suara. Tak dipungkiri, uang lebih menjadi endemik di banyak negara demokrasi baru, seperti Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019; Berenschot, 2018; Berenschot & Aspinall, 2020; Muhtadi, 2019).

Oligarki dapat di pandang dari dua sisi yakni sisi politik dan sisi ekonomi politik. Dari sisi politik merupakan pemusatan kekuasaan pada segelintir elit yang menjalankan urusan kepentingan publik dengan mekanisme dan aturan yang dibuatnya. Sedangkan dari sisi ekonomi-politik, relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya ekonomi pada segelintir pihak, dalam konteks ini relasi pengusaha dan elit politik saling menguntungkan secara timbal balik. Dengan kata lain, oligarki dapat didefinisikan sebagai politik mempertahankan kekayaan, baik terlibat kekuasaan secara langsung maupun tidak langsung. (Hajad, 2017)

Karena itulah, Penulis menilai demokrasi dan oligarki bisa hidup berdampingan, bahkan oligarki akan tetap bertahan di dalam sistem politik yang demokratis. Politik uang yang dilakukan oligarki menjadi sangat dominan dan *vote-buying* terjadi dalam setiap pemilihan umum, sehingga proses pemilihan politik tidak bisa dikatakan sebagai pemilu yang demokratis. Dengan demikian, demokrasi dapat ditafsir ulang sebagai instrumen para oligark untuk mendapatkan kuasa politik melalui mekanisme elektoral yang sah.

METODE

Artikel ini hendak memahami dinamika politik di Kota Tasikmalaya terutama ketika para oligark melakukan perebutan kekuasaan melalui politik elektoral. Kesempatan ini terbuka pada era reformasi yang telah membawa angin segar perubahan ke arah sistem politik yang lebih terbuka. Memahami dinamika politik tersebut, peneliti melakukan riset dengan secara serius dan hati-hati. Tujuannya agar kedetailan mengenai dinamika politik di locus penelitian dapat tergambarkan secara komprehensif dan memuaskan. Untuk itu, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memahami lapangan. Peneliti menilai gambaran utuh dan komprehensif mengenai tujuan penelitian melalui pemahaman mendalam dan otentik mengenai pengalaman individu atau kelompok dapat terjadi.

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2023 hingga Mei 2023, di Kota Tasikmalaya (sering disebut Kota Tasik) dipilih secara *purposive* atas alasan sebagai pusat kapital ada pengusaha besar pemilik PT.TRM dan Endang Juta (pengusaha pertambangan pasir dan pengusaha kontraktor) yang terlibat langsung dalam arena politik. Kemudian di Kota

Tasikmalaya, hampir sebagian besar bisnis dan retail besar ataupun kecil dikuasai pengusaha keturunan Tionghoa. Mulai pemilihan walikota (pilwalkot) dan pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Barat sejak diselenggarakan tahun 2005 hingga 2018, kemudian pemilu tahun 2004 hingga 2019 (pileg dan pilpres) para penguasa kapital ini semakin terang-terangan untuk terlibat langsung maupun tidak langsung bersaing dalam kontestasi pilwalkot, pilgub, pileg dan pilpres di Kota Tasikmalaya.

Mendapatkan data yang komprehensif, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, *library research*, observasi partisipatoris, dan juga *focus group discussions* (FGD). Sebelum mendapatkan hasil optimal, peneliti melakukan *library research* untuk memahami dinamika politik yang telah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Setelah mendapatkan data dan informasi mengenai hal itu, Peneliti melanjutkan untuk mencermati dinamika politik di Jawa Barat, khususnya di Kota Tasikmalaya. Landasan ini sebagai alat untuk menganalisis penelitian lapangan selanjutnya.

Wawancara mendalam dan FGD pada beberapa informan selalu dilaksanakan di sela-sela observasi. Beberapa narasumber di antaranya birokrat, elit partai, pengusaha, akademisi, dan jurnalis. Terakhir, menguji keabsahan data, Peneliti memanfaatkan metode triangulasi sumber yang bertujuan memeriksa keabsahan data guna menjaga tingkat keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Flick, 2022; Timmermans & Tavory, 2022).

Tabel 1. Narasumber Penelitian

No.	Narasumber	Jumlah
1	Birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya	10 orang
2	Anggota Parlemen Kota Tasikmalaya	7 orang
3	Pengusaha	7 orang
5	Akademisi	7 orang
6	Jurnalis	5 orang

Sumber: Peneliti (2023)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Praktek *Rent Seeking* dan Akumulasi Kekayaan, Motivasi Oligarki

Apa yang paling memotivasi para oligark di Kota Tasikmalaya memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu ataupun pilkada ?. Pertanyaan ini dilandasi perubahan iklim politik reformasi tahun 1999 dan pemekaran Tasikmalaya tahun 2001. Awalnya desentralisasi dan pemekaran wilayah diharapkan terjadi *good governance*, *good goverment*, demokratisasi lokal, dan kesejahteraan rakyat. Ternyata pasca pemekaran, masih menyisakan konflik perebutan aset - aset tanah dan bangunan antara Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Tasikmalaya dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya yang tidak dihibahkan begitu saja oleh Pemkab Tasikmalaya kepada Pemkot Tasikmalaya.

Konflik perebutan aset inilah yang menjadi titik awal riset, kenapa konflik baru terselesaikan sebagian selama 12 tahun ?. Ditambah lagi pemberitaan, Bupati Tasikmalaya berupaya menjual dan menyewakan aset milik Pemkab Tasikmalaya yang berada di wilayah Pemkot kepada sejumlah pengusaha. Pemkab Tasikmalaya tidak ingin menggratiskan asetnya kepada Pemkot Tasikmalaya, lebih baik asetnya dikelola swasta untuk menambah anggaran Pemkab Tasikmalaya. Padahal penjualan aset negara kepada swasta bisa menjadikan bupati terjerat hukum⁷. (Radartasikmalaya.com 2017; Priangan.com 2019; Fuzianti. 2018; Antaranews.com, 2011)

Ternyata perebutan aset ini dilatar belakangi sejumlah kepentingan pengusaha yang ingin mengelola dan membeli tanah – bangunan milik Pemkab Tasikmalaya yang berada di wilayah Pemkot Tasikmalaya. Kemudian terjadinya praktik – praktik *rent seeking* para pengusaha yang ingin kepentingan bisnisnya mendapatkan *privilege* dari pemerintah yang sedang membangun sejumlah fasilitas infrastruktur. Maka siapa saja yang mendapatkan proyek - proyek pasca pemekaran Tasikmalaya ?. Sebelum menjelaskan hal tersebut, perburuan rente adalah para pengusaha yang bisa memberikan upeti besar kepada pejabat pemerintah, terjadi kolusi antara aparat pemberi izin dengan para *rent seeking*.

Rent seeking ini terjadi karena memonopoli bisnis dan proyek dengan menambah penggunaan modal jaringan kekuasaan. Pengusaha memperoleh keuntungan bukan melalui persaingan pasar. Kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi pasar, sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Pelaku usaha yang melobi mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya sendiri dengan mengorbankan para pengusaha lainnya yang ingin berbisnis secara sehat.

Setelah Pemkot Tasikmalaya diresmikan sebagai pemerintahan baru, membutuhkan pembangunan sarana fasilitas publik untuk mendukung program kerja pemerintahan. Salah satu fasilitas publik yang memicu terjadinya praktek *rent seeking* paling kentara untuk melakukan riset ini, adalah persoalan relokasi terminal yang dianggap tidak “layak” untuk dibangun terminal yang lebih besar bertipe A.

Ternyata dibalik relokasi dan pembangunan terminal tipe A, bukan karena masalah ketidaklayakan fasilitas terminal. Namun ada pengusaha besar yang sudah melakukan lobi politik di belakang layar dengan pejabat Pemkot Tasikmalaya, agar tidak perlu mempertahankan terminal lama. Lebih baik membangun terminal lebih besar di lahan yang

⁷ Wawancara dengan mantan pejabat Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 30 Mei 2023

baru. Pengusaha tersebut yakni pemilik PT Tri Mukti (PT.TRM) yang sudah menyiapkan *site plan* di lokasi lahan miliknya sendiri. Mulai penyusunan proposal relokasi, pembebasan lahan, hingga pembangunan fasilitas terminal semua dimonopoli PT.TRM. Seharusnya proyek besar ini dilelang untuk menghindari praktik ilegal. Tapi karena pengusaha ini dekat dengan pejabat yang berkuasa saat itu maka memiliki *priviledge* memonopoli semua proyek.

Kedekatan PT.TRM dengan para pejabat di Pemkot Tasikmalaya tidak hanya urusan terminal yang sudah menelan Rp 37 miliar pada tahun 2002-2003. Praktek *rent seeking* juga dilakukan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan dan bendungan. Hingga mendapatkan akses mengeksplorasi galian C di lahan - lahan perbukitan. Sehingga PT.TRM dengan bisnis – politiknya bisa meraup profit ratusan miliar bahkan triliunan dari dana pemerintah.

Selama melakukan riset, tidak hanya pemilik PT.TRM sebagai pengusaha pribumi yang ingin mendapatkan akses bisnis mudah dari pemerintah. Sejumlah pengusaha Tionghoa di Kota Tasikmalaya juga bebas berafiliasi membangun jejaring politik dengan para elit politik lokal dan aparat keamanan. Para pengusaha Tionghoa ini tidak memiliki ideologi politik atau identifikasi kepartaian. Dibenak kepentingan jejaring politiknya bagaimana memuluskan bisnis, uang, dan kapitalisasi. Berpolitik hanya kepentingan bisnis, bagaimana mengamankan dan melindungi bisnis selama mungkin. Berpolitik agar lebih dekat dengan para elit yang menyusun kebijakan, bukan berpolitik untuk kepentingan warga Tasikmalaya, tapi lebih kepada kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya⁸.

Berdasarkan uraian di atas, para pengusaha pribumi maupun keturunan Tionghoa memiliki kepentingan untuk mendapatkan akses jejaraing politik, agar bisa mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan dari bisnisnya. Kemudian bagaimana para pengusaha ini memiliki akses dan hak istimewa dari para pemangku kebijakan dan mendapatkan jejaring politik dengan para pejabat dan elit parpol, sehingga kepentingan bisnisnya diakomodasi ?. Penjelasan ini akan dipaparkan pada sub bahasan di bawah ini kepentingan para pengusaha yang memiliki kekuasaan oligarki di arena politik Kota Tasikmalaya.

Membiayai Suara Politik untuk Kepentingan Elit Partai dan Calon Walikota

Hadiz dan Robinson (2014) menganalisis sistem desentralisasi telah terjadi “*big bang*” kewenangan politik secara riil ke tangan kepala daerah dan elit DPRD. Namun dari riset ini, “*big bang*” desentralisasi di Kota Tasikmalaya, kekuasaan politik tidak hanya bergeser ke tangan para pejabat elit partai. Kepentingan bisnis yang lebih besar menjadikan terjadinya

⁸ Wawancara salah pengusaha Tionghoa yang masuk ke dalam arena politik, 20 Maret 2023

pergeseran kepada elit non pemerintah, yakni sejumlah pengusaha dengan kuasa uangnya bermetamorfosa sebagai oligark.

Para pengusaha yang disebutkan di atas agar mendapatkan jejaring politik untuk memenangkan kursi legislator dan kepala daerah jagoannya. Mereka secara langsung maupun tidak langsung bergerilya menabur kekuatan uangnya untuk merebut suara pemilih yang dibiayai kepentingan kompetisi politik elektoral sejak tahun 2007. Bahkan tidak segan – segan para oligark tersebut mampu mencampakkan *incumbent* dari jabatan politiknya, yang dianggap telah menghalang-halangi kepentingan bisnisnya. Hal ini terbukti ketika pilwalkot 2012 dan 2017, kemudian pada sejumlah anggota legislatif pada pemilu 2014 dan 2019

Bagaimana dengan perilaku politik pengusaha keturunan Tionghoa ?. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, bahwa peran politik para pengusaha Tionghoa hampir sama dengan pengusaha besar pribumi lainnya. Untuk mendapatkan jejaring dan relasi politik dengan sejumlah elit partai dan pejabat negara. Para pengusaha Tionghoa mengandalkan kekuatan finansialnya sebagai basis kekuatan politiknya, yakni dengan cara membiayai dan mendanai berbagai fasilitas kepentingan politik para elit parpol dan para calon walikota. Akan tetapi, pengusaha Tionghoa tersebut tidak terlalu kentara, dan akan selalu bersembunyi di balik layar politik para pejabat politik. Karena mereka tahu dinamika politik Tasikmalaya masih agak tabu jika pengusaha Tionghoa mendapat hak istimewa.

Akan tetapi, berdasarkan penelusuran Peneliti ada sejumlah pengusaha keturunan Tionghoa yang menjadi pengurus partai. Anehnya pengusaha non muslim ini masuk ke dalam partai berbasis Islam. Secara *de jure* pengusaha ini masuk ke dalam struktural parpol. Namun secara *de facto* tidak secara struktural sebagai elit parpol. Karena pengusaha ini di dalam parpol tersebut tidak pernah sekalipun menunjukkan sebagai elit parpol, dan mengajak para konstituen mengkampanyekan partai tersebut. Secara jelas pengusaha Tionghoa ini tidak mendukung parpol secara ideologi, visi misi, ataupun *platform*-nya. Karena yang menjadi ideologi hanya mempertahankan kepentingan bisnisnya. Bagaimana arena politik bisa mendatangkan keuntungan dan memudahkan bisnis perusahaannya. Oleh karena itu, yang menjadi dasar para pengusaha Tionghoa adalah mencari keuntungan dan hak istimewa dari kedekatannya dengan para pejabat politik.

Kemudian pada pilwalkot tahun 2017, salah satu pengusaha Tionghoa yang juga *owner* hotel besar di Kota Tasikmalaya menjadikan tempat usahanya sebagai basis kampanye politik calon walikota dua periode. Berbagai fakta diperlihatkan bahwa sejumlah pengusaha besar Tionghoa berada di belakang layar politik calon *incumbent* dua periode. Alasan utama pengusaha ini mendukung calon walikota, sudah ada kesepakatan bisnis yang harus

direalisasikan, yakni kemudahan izin usaha untuk membangun bisnis perhotelan dan bisnis retail besar di pusat kota.

Keberadaan para pengusaha keturunan Tionghoa di Kota Tasikmalaya sebenarnya telah memberi dampak positif terhadap pembangunan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi kepentingan publik dan politik, bisnis yang dijalankan pengusaha Tionghoa ini mendapat hak istimewa dari pemerintah sehingga makin menggurita di berbagai sektor bisnis Kota Tasikmalaya.

Para pengusaha Tionghoa ini sama halnya dengan pengusaha pribumi lainnya. Baik secara kolektif atau bertindak secara individu, mereka sangat aktif melakukan lobi – lobi politik, bahkan terbukti mendukung calon-calon elit politik dengan mengucurkan pembiayaan kampanye politik terhadap beberapa calon elit di pemerintahan. Ada yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam mengkampanyekan calon tersebut agar menduduki kekuasaan. Stigma negatif dan sikap diskriminatif terhadap kaum minoritas Tionghoa di Kota Tasikmalaya sudah memudar. Hanya saja stigma orang Tionghoa sebagai kaum kaya raya yang minoritas, menyebabkan pengusaha tersebut selalu dijadikan ‘sapi perah’ oleh para elit-elit parpol dan birokrat. Apalagi sudah menyangkut kepentingan izin usahanya. Dengan terlibatnya sejumlah pengusaha Tionghoa di arena politik. Mengharapkan relasi politik warga keturunan Tionghoa yang tidak sekedar menjadi “sapi perahan” untuk memanfaatkan uangnya saja. Tetapi menjadi warga Kota Tasikmalaya yang memiliki hak politik yang sama dengan warga pada umumnya.

Kendati demikian, besarnya kepentingan bisnis yang dilakukan para pengusaha pribumi ataupun keturunan Tionghoa. Ada timbal balik yang tidak gratis, *deal – deal* politik dengan para elit parpol harus menuruti kepentingan para pengusaha tersebut. Jika para calon pejabat tidak mengikuti keinginan para oligark sudah dipastikan akan gagal memperoleh kursi jabatan. Kekalahan *incumbent* yang paling kentara ditumbangkan para oligark, ketika pilwalkot tahun 2012 dan 2017. Bagaimana para oligark menguasai arena politik secara bersama-sama menumbangkan calon petahana walikota yang tidak menepati janji politiknya.

Selama menjabat, *incumbent* dianggap kebijakannya terlalu populis menguntungkan masyarakat. Namun kebijakannya tersebut tidak menguntungkan secara bisnis berdasarkan perspektif para oligark. Sehingga kekuasaan *incumbent* atau calon elit politik yang dianggap pembangkang, diupayakan harus ditumbangkan. Lebih baik mencari calon pejabat politik yang bisa diajak kerjasama ekonomi – politik untuk menguntungkan oligarki. Bahkan sejumlah kasus yang terjadi pada politik elektoral di Kota Tasikmalaya, tercampaknya *incumbent* dari jabatan politik bukan saja dari ekspresi politik oposisi dan suara pemilih. Tetapi kekuatan dan

kuasa uang dari para oligark telah mampu menyingkirkan *incumbent* yang dianggap terlalu menjengkelkan dari kebijakan politik yang dibuatnya.

Dari hasil riset ini, kemunculan kuasa oligarki memang sebagai fenomena politik yang layak perhatian ilmiah. Para oligark akan selalu menang, atau tidak banyak persoalan politik penting yang tidak menjadi kepentingan bersama antara para oligark. Kendati dianggap keniscayaan mengenai kekuatan kekayaan oligark – oligark yang berada di belakang aktor politik. Meski *incumbent* atau para elit politik dianggap tokoh reformis dan populis di Kota Tasikmalaya. Para oligark mampu bergerak lebih dinamis menunjukkan kekuatannya, karena ada kepentingan - kepentingan oligarki yang dirugikan oleh kebijakan para pejabat tersebut.

Sementara itu peneliti menganalisis berdasarkan hasil wawancara sejumlah informan, tentang pola politik uang yang dilakukan para oligark dalam pileg dan pilpres tahun 2019. Sejumlah pengusaha besar di Kota Tasikmalaya meng-*endorse* kandidat jagoannya yang diusungnya. Bahkan ada informasi yang beredar dan di muat media sosial dan media nasional, bahwa para pengusaha menggelontorkan pembiayaan para caleg dan elit partai mencapai puluhan miliar.

Praktek politik uang pada politik elektoral tahun 2019, bak “gelombang tsunami” politik yang dahsyat. Bahkan sejumlah publik menyebutnya sebagai “Tsunami Politik” di Tasikmalaya. Paket ‘*ampau*’ variatif mulai Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu per orang, disebar di setiap dapil Tasikmalaya. Sebaran politik uang skalanya luas dan merata. Maka tak heran perolehan suara dan kursi sejumlah elit yang dibiayai para pengusaha mampu memperoleh kursi di DPRD Kota Tasikmalaya dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Menurut sejumlah informan, munculnya fenomena tsunami politik uang banyak tokoh dari kalangan ulama, masyarakat, serta politisi yang tidak biayai oleh para oligark merasa prihatin dan khawatir terhadap demokratisasi lokal Tasikmalaya. Praktek politik uang yang menjadi determinan telah merusak mental politik masyarakat semakin pragmatis dan oportunis. Sehingga kontestasi politik apapun nantinya, terutama menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 akan selalu dikaitkan dengan transaksi politik uang dari para oligark. Bahkan kekuatan finansial ini telah memunculkan fenomena “*Matinya Ketokohan*” di setiap kampung atau wilayah Kota Tasikmalaya. Karena masyarakat lebih memilih calon elit politik yang memberi uang, daripada calon yang di arahkan untuk memilih elit partai yang memiliki jargon - jargon reformis dan populis.

Menurut Winters (2014), sistem politik lokal dengan adanya kuasa oligarki semakin ironis bagi kepentingan masyarakat lokal. Karena terdapat begitu banyak cara yang tersedia dan memudahkan bagi para oligark mengekspresikan kekuasaannya di dalam proses demokrasi

elektoral. Bahkan peran oligarki jauh lebih besar sejak Soeharto tumbang, ketimbang sebelum masa transisi politik reformasi. Sebagian besar publik yang memiliki pandangan progresif, miris melihat kuasa kekayaan oligark lebih banyak mengekang demokrasi, ketimbang demokrasi mengekang kuasa kekayaan para oligark. Tidak ada sesuatu yang niscaya permanen dalam hal dominasi oligarkis. Namun untuk sekarang, oligark (pelaku) dan oligarki (para pelaku) memang menempati posisi utama dalam analisis politik Indonesia terutama di era demokrasi menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024.

Dari hasil penelitian ini begitu yakin berdasarkan refleksi pemilu dan pilkada di Kota Tasikmalaya. Bahwa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang masih dikendalikan kekuasaan para oligark. Peran kuasa dari para oligark ini tidak sepenuhnya didominasi dan dipengaruhi oleh perilaku aktor dalam memainkan kendali atas perpolitikan lokal. Oligark (pelaku) atau oligarki (para pelaku) bisa memainkan kuasanya karena diberi kesempatan oleh struktur politik dan kelembagaan baru di era demokratisasi politik elektoral.

Tidak menjadi sebuah dominasi dari perilaku elit menempati posisi utama dalam perpolitikan lokal Tasikmalaya ini. Jika sistem politik dan kultur sosial masyarakatnya juga memberikan celah terbuka dan kesempatan bagi para oligark untuk memainkan peran kuasa dan strategi politiknya di daerah. Kemunculan kuasa dan peran oligark karena ada dukungan dari sistem politik desentralisasi yang lebih liberalis, jika dibandingkan era politik sentralisme Soeharto yang hanya terbatas pada segelintir elit di pemerintahan maupun aparat keamanan yang masuk jejaring patronase politiknya, dengan memberikan jatah berkuasa di daerah dan memberikan berbagai upeti kepada pihak pusat.

KONKLUSI

Sistem reformasi politik elektoral di Indonesia sejak tahun 1999 dan pilkada langsung tahun 2005 memang menunjukkan perubahan keterbukaan politik dan demokratisasi. Namun keterbukaan politik di Kota Tasikmalaya ini malah dimanfaatkan para pengusaha sebagai oligark mengendalikan para elit politik untuk kepentingan bisnisnya. Pola yang dilakukannya dengan memanfaatkan kekuatan finansialnya untuk membiayai kepentingan politik elit partai dan calon walikota pada saat kampanye.

Jika berdasarkan hasil refleksi pemilu dan pilkada terakhir masih dikendalikan para oligark, tanpa ada perubahan signifikan dari sistem maupun lembaga politik untuk meminimalisir permainan politik oligarki. Maka sangat diyakini proses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Kota Tasikmalaya akan tetap dikendalikan kekuatan uang para oligark. Peran politik para oligark ini tidak hanya dipengaruhi perilaku untuk memainkan kendali atas

perpolitikan. Oligarki bisa memainkan kuasanya karena memang diberi kesempatan oleh sistem politik dan kelembagaan demokrasi politik elektoral langsung.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah : Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung : Widya Padjajaran.
- Agustino, Leo. 2010. Dinasti Politik Pasca – Otonomi Orde Baru : Pengalaman Banten. *Jurnal Prisma*. 29 (3) : 102-116.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Antaraneews.com. 2011. “Sejumlah Aset Kabupaten Tasikmalaya Akan Dijual”. Melalui <<https://www.antaraneews.com/berita/264601/sejumlah-aset-kabupaten-tasikmalaya-akan-dijual>>
- Bayo, Longgina Novadona, Purwo Santoso, dan Willy Purna Samadhi. 2018. *Rezim Lokal di Indonesia, Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan PolGov Fisipol UGM.
- Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563–1593. <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>.
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How clientelism varies: comparing patronage democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- Creswell, John W. 2015. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Ahmad Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djani, Luky dan Putut A Saputro. 2013. Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal : Sebuah Tawaran Kerangka Analisis. *Jurnal Prisma*, 32 (1) : 107-120.
- Ford, Michele dan Pepinsky, T. 2014. Melampui Oligarki ?, Bahasan Kritik Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Prisma*, 33 (1) : 3-10.
- Flick, U. (2022). *The SAGE Handbook of Qualitative Research Design*. Sage Publications.
- Fuzianti. 2018. “Tasikmalaya : Persengketaan Aset Antara Pemerintah Kabupaten dan Kota. Melalui <<https://medium.com/@fuzianti21/persengketaan-aset-antara-kabupaten-dan-kota-tasikmalaya-763350396c7c>>
- Hadiz, Vedi R dan Robinson, R. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia : The Political Oligarchy in an Age of Market*. London : Routledge.
- Hadiz, Vedi R dan Robinson, R. 2014. Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia. *Jurnal Prisma*, 33 (1) : 35-56.
- Hadiz, Vedi R. 2013. The Rise of Capital dan Keniscayaan Ekonomi-Politik. *Jurnal Prisma*, 32 (1) : 3-19.
- Hajad, Vellayati. 2018. Oligark Sebagai Rent Seeker : Haruskah ?. *Public Policy*, 3 (1) : 27-37.
- Nazsir, Nasrullah dan Amril Gaffar S. 2004. *Partai Politik, Partisipasi Politik dan Pendidikan Politik dan Pendidikan Politik*. Bandung : Program Pascasarjana FISIP UNPAD. Dalam Tesis yang tidak dipublikasikan.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan.

- Moleng, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung : PT Rosda Karya.
- Radartasikmalaya.com. 2017. “eks Terminal Cilembang Akan Jadi Mall”. Melalui <<https://www.radartasikmalaya.com/eks-terminal-cilembang-akan-jadi-mall>>.
- Prihatmoko, Joko J. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang : LP21 Press.
- Priangan.com. 2019. “Lahan Bekas Terminal Cilembang Ada Wacana Dibangun Hotel”. Melalui <<https://priangan.com/lahan-bekas-terminal-cilembang-ada-wacana-dibangun-hotel/>>
- Timmermans, S., & Tavory, I. (2022). *Data Analysis in Qualitative Research: Theorizing with Abductive Analysis*. Chicago University Press.
- Widanarto, Agustinus. (2011). *Evaluasi Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Bandung*. (internet). Tersedia dalam <<http://www.google.co.id/repository.unpad.ac.id>> (diakses pada 28 November 2017).